

**EVALUASI PERATURAN BUPATI KARO NOMOR 32 TAHUN 2019
TENTANG DESA WISATA DI DESA DOKAN KECAMATAN
MEREK KABUPATEN KARO**

SKRIPSI

OLEH:

PEDIMA PRIMA GINTING

218520055



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 24/12/25

Access From (repositori.uma.ac.id)24/12/25

**EVALUASI PERATURAN BUPATI KARO NOMOR 32 TAHUN 2019
TENTANG DESA WISATA DI DESA DOKAN KECAMATAN
MEREK KABUPATEN KARO**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Di
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area



OLEH:

**PEDIMA PRIMA GINTING
218520055**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**


HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Evaluasi Peraturan Bupati Karo Nomor 32 Tahun 2019 Tentang
Desa Wisata Di Desa Dokan Kecamatan Merek Kabupaten Karo

Nama : Pedima Prima Ginting


NPM : 218520055

Program Studi : Administrasi Publik




Disetujui Oleh
Dr. Drs. Indra Muda, M.AP
Pembimbing

Mengetahui



Dr. Walid M. S. S. M.I.P
Dekan Fakultas Isipol



Dr. Drs. Indra Muda, M.AP
Ka.Prodi Administrasi Publik

Tanggal Lulus: 19 Agustus 2025

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Pedima Prima Ginting

NPM : 218520055

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jurusan : Administrasi Publik

Dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya skripsi yang berjudul **“EVALUASI PERATURAN BUPATI KARO NOMOR 32 TAHUN 2019 TENTANG DESA WISATA DI DESA DOKAN KECAMATAN MEREK KABUPATEN KARO”** adalah benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini maka sepenuhnya merupakan tanggungjawab penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 19 Agustus 2025



Pedima Prima Ginting
218520055

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR /SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Citivitasi Akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pedima Prima Ginting

Npm : 218520055

Program Studi : Administrasi Publik

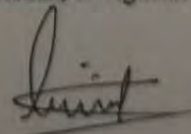
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: “Evaluasi Peraturan Bupati Karo Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Desa Wisata Di Desa Dokan Kecamatan Merek Kabupaten Karo” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas non eksklusife ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-an, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 19 Agustus 2025



Pedima Prima Ginting
Npm 218520055

ABSTRAK

Desa wisata merupakan pengembangan wilayah pedesaan yang menjadikan sebuah desa menjadi tujuan wisata yang memanfaatkan potensi yang dimiliki. Potensi ini bisa berupa keindahan alam, budaya, tradisi, dan produk-produk lokal yang khas. Tujuan dari desa wisata itu sendiri adalah untuk memberdayakan masyarakat setempat agar mereka bisa terlibat secara langsung dalam kegiatan pariwisata dan mendapatkan manfaat ekonomi, sosial, maupun budaya. Semenjak peraturan tersebut dibuat pelaksanaannya belum berjalan dengan baik, sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian melalui pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Teori evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada model evaluasi William N. Dunn, yang mencakup enam indikator: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Bupati Karo tersebut belum optimal, disebabkan oleh kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap potensi pariwisata desa dan rendahnya fasilitas pendukung yang tersedia. Meskipun demikian, masyarakat Desa Dokan menunjukkan inisiatif tinggi dalam menjaga dan mengembangkan warisan budaya lokal melalui kegiatan seperti festival budaya, pengenalan rumah adat Siwaluh Jabu, dan pelestarian seni tradisional. Faktor penghambat utama dalam implementasi kebijakan ini meliputi keterbatasan anggaran, minimnya sosialisasi kebijakan, serta kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat dan penguatan peran pemerintah sangat diperlukan untuk mewujudkan Desa Dokan yang lebih berkembang dalam sektor pariwisata.

Kata Kunci: Evaluasi, Peraturan, Desa, Wisata

ABSTRACT

A tourism village is a development of a rural area that transforms a village into a tourist destination that utilizes its potential. This potential can include natural beauty, culture, traditions, and unique local products. The purpose of a tourism village itself is to empower local communities so they can be directly involved in tourism activities and obtain economic, social, and cultural benefits. Since the regulation was created, its implementation has not been running well, so the researcher was interested in conducting research through a qualitative descriptive approach with data collection techniques through observation, interviews, documentation, and triangulation. The evaluation theory used in this study refers to William N. Dunn's evaluation model, which includes six indicators: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy. The results of the study indicate that the implementation of the Karo Regent Regulation has not been optimal, due to the lack of local government attention to the village's tourism potential and the limited availability of supporting facilities. Nevertheless, the people of Dokan Village have shown high initiative in maintaining and developing local cultural heritage through activities such as cultural festivals, the introduction of the Siwaluh Jabu traditional house, and the preservation of traditional arts. The main inhibiting factors in the implementation of this policy include budget constraints, minimal policy dissemination, and a lack of coordination between stakeholders. This study concludes that community empowerment and strengthening the government's role are essential to realizing a more developed Dokan Village in the tourism sector.

Keywords: Evaluation, Regulations, Village, Tourism

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

1. Nama : Pedima Prima Ginting
2. Alamat : Desa Muliarayat Kecamatan Merek
Kabupaten Karo
3. Tempat/Tanggal Lahir : Tigapanah, 05 Januari 2003
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Agama : Kristen Protestan
6. Status Pernikahan : Belum Menikah
7. Warga Negara : Indonesia
8. Nomor Telepon/HP : 085762634625
9. E-mail : pedimaprima@gmail.com
10. Kode Pos : 22173

PENDIDIKAN FORMAL

- | | |
|---------------|--------------------------|
| 2010-2015 | : SD Negeri 040531 Dokan |
| 2015-2018 | : SMP Negeri 1 Tigapanah |
| 2018-2021 | : SMA Negeri 1 Tigapanah |
| 2021-Sekarang | : Universitas Medan Area |
| Jurusan | : Administrasi Publik |

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, penyertaan dan kekuatan yang telah diberikan sehingga penulisan skripsi ini dapat di selesaikan dengan baik, izinkanlah saya mempersembahkan karya sederhana ini sebagai ungkapan terimakasih yang tulus dan penuh cinta kepada:

1. Kedua orang tua saya yang tercinta Abner Budiman Ginting dan Ulinta br Tarigan yang telah menjadi sumber kekuatan, doa, kasih sayang dan pengorbanan tiada henti dalam setiap langkah hidup saya. Terimakasih atas segala didikan yang tidak ternilai, yang menjadi pijakan kokoh dalam perjalanan panjang ini.
2. Saudara-saudara saya yang tersayang Mizpha Ade Listra br Ginting, Brinki Hadi Ginting, Dewi Natasya br Tarigan dan kekasih saya Devi Nabina br Sinulingga. Terimakasih atas segala doa dan dukungan yang selalu menguatkan saya di setiap pengerjaan hingga menyelesaikan karya ini dengan baik.
3. Kepada keluarga besar Ginting dan Tarigan, terimakasih atas segala, dukungan serta nasehat yang diberikan kepada saya sehingga saya mampu menyelesaikan karya ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian proposal ini dengan judul "*Evaluasi Peraturan Bupati Karo Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Desa Wisata Di Desa Dokan Kecamatan Merek Kabupaten Karo*"

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Drs Indra Muda, M.AP selaku pembimbing yang telah memberi banyak arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini, serta Ibu Dr. Beby Mashito Batubara, Sos, M.AP selaku ketua yang telah banyak memberi arahan dalam penulisan skripsi ini serta Bapak Amas Mashudin, S.IP, M.AP, selaku sekretaris yang telah banyak memberikan masukan dalam penyusunan skripsi ini. Disamping itu saya berterima kasih banyak kepada staf pengajar, pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah melayani setiap proses administrasi penulis.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir/skripsi/tesis ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tugas akhir/skripsi/tesis ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat baik untuk kalangan pendidikan maupun masyarakat. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.

Medan, 19 Agustus 2025

Pedima Prima Ginting

218520055

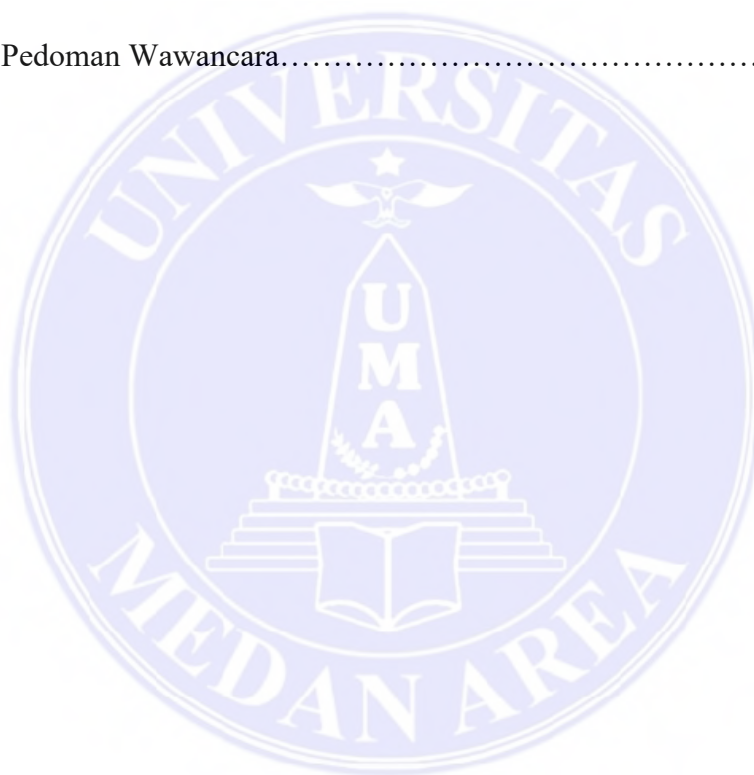
DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTACT.....	ii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
1.4.1 Manfaat Teoritis	4
1.4.2 Manfaat Praktis.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Evaluasi.....	5
2.1.1 Defenisi Evaluasi	5
2.1.2 Model Evaluasi.....	7
2.2 Pariwisata.....	8
2.2.1 Defenisi Pariwisata.....	8
2.2.2 Bentuk Pariwisata.....	10
2.2.3 Jenis Pariwisata	11
2.2.4 Tujuan Pariwisata	12
2.2.5 Potensi Wisata	12
2.3 Pengembangan Pariwisata	13
2.3.1 Defenisi Pengembangan Pariwisata.....	13
2.3.2 Pengembangan Daerah Tujuan Wisata.....	15

2.4 Kearifan Lokal	16
2.4.1 Defenisi Kearifan Lokal	16
2.4.2 Ciri dan Fungsi Kearifan Lokal.	17
2.5 Penelitian Terdahulu	18
2.6 Kerangka Pemikiran	21
BAB III METODE PENELITIAN.....	24
3.1 Jenis Penelitian	24
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	24
3.2.1 Lokasi Penelitian	24
3.2.2 Waktu Penelitian.....	25
3.3 Informan Penelitian	25
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	28
3.5 Teknik Analisis Data.....	30
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	33
4.1 Hasil Penelitian	33
4.1.1 Gambaran Umum Desa Dokan.....	33
4.1.2 Keadaan Penduduk Desa Dokan	34
4.1.3 Objek Wisata Desa Dokan	35
4.1.4 Visi Misi Desa Dokan.....	37
4.2 Pembahasan.....	39
4.2.1 Evaluasi Peraturan Bupati Karo no 32 Tahun 2019.....	59
4.2.2 Faktor Penghambat.....	74
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	78
5.1 Kesimpulan	78
5.2 Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	81

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu	19
Tabel 2 Waktu Penelitian	25
Tabel 3 Jumlah PendudukDesa Dokan.....	34
Tabel 4 Tenaga Kerja Menurut Lapangan Pekerjaan.....	34
Tabel 5 Jumlah Pengunjung Desa Dokan.....	41
Tabel 6 Pedoman Wawancara.....	84



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Pemikiran.....	23
Gambar 2 Teknik Analisis.....	32
Gambar 3 Wisata Desa Dokan.....	37
Gambar 4 Struktur Organisasi Desa Dokan.....	39
Gambar 5 Festival Budaya Dokan.....	45
Gambar 6 Wawancara dengan Wisatawan Asing.....	48
Gambar 7 Wawancara dengan Kepala Desa Dokan.....	53



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa wisata merupakan pengembangan wilayah pedesaan yang menjadikan sebuah desa menjadi tujuan wisata yang memanfaatkan potensi yang dimiliki. Potensi ini bisa berupa keindahan alam, budaya, tradisi, dan produk-produk lokal yang khas. Tujuan dari desa wisata itu sendiri adalah untuk memberdayakan masyarakat setempat agar mereka bisa terlibat secara langsung dalam kegiatan pariwisata dan mendapatkan manfaat ekonomi, sosial, maupun budaya. Pemerintah kabupaten karo ingin mewujudkan hal tersebut dengan mengeluarkan peraturan bupati nomor 32 tahun 2019 tentang desa wisata, isi dari peraturan tersebut berupa pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan potensi desa wisata yang ada di kabupaten karo. Dalam pelaksanaannya peraturan tersebut belum berjalan maksimal, munculnya fenomena atau permasalahan di tengah masyarakat yang dimana masyarakat desa merasa tidak diperhatikan oleh pemerintah daerah walaupun isi dari kebijakan tersebut bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat melalui pemanfaatan wisata desa dikan.

Evaluasi terhadap kebijakan desa wisata perlu dilakukan untuk mengetahui apa kekurangan dari pelaksanaan kebijakan tersebut, sehingga akan mempermudah para pemangku kebijakan dalam memperbaiki ataupun memberikan solusi yang sesuai agar pengimplementasian kebijakan tersebut menjadi lebih baik. Karena seperti yang diketahui sejak dikeluarkannya peraturan bupati karo nomor 32 tahun 2019 hingga kini 2025 masyarakat belum merasakan bantuan dari pemerintah.

Payung hukum yang mengatur tentang desa wisata itu adalah Peraturan Bupati Karo No. 32 Tahun 2019, BAB II Pasal 2 menyebutkan bahwa penyelenggara desa wisata bertujuan untuk:

- a. Memanfaatkan dan memberdayakan potensi lingkungan guna kepentingan wisata sejarah, wisata alam, wisata agro, wisata budaya, wisata buatan, wisata kuliner, wisata kerajinan tangan, dan wisata taman bumi atau geopark dalam rangka peningkatan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
- b. Memlihara dan membina secara terus menerus tata kehidupan, seni budaya masyarakat daerah.
- c. Mengembangkan kualitas lingkungan masyarakat desa serta potensi kebudayaan dan wisata yang terdapat di masing-masing desa wisata.
- d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- e. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengembangkan potensi alam dan mengkonservasi/melestarikan adat, budaya serta arsitektur yang ada secara turun temurun.
- f. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam konservasi satwa dan tumbuhan khas serta lingkungan alam.
- g. Mendorong masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih, rapi dan sehat.
- h. Mempercepat penanaman sikap dan keterampilan yang sesuai dengan sapa pesona wisata indonesia.
- i. Menumbuhkan kebanggaan terhadap adat istiadat, budaya dan desanya,

Dengan adanya payung hukum ini bisa dijadikan landasan atau aturan dalam pengembangan desa wisata. Namun kenyataan hal tersebut belum bisa terwujud karena kurangnya perhatian pemerintah terhadap desa wisata yang ada di kabupaten karo khususnya di desa dokan sehingga pergerakan yang dilakukan masyarakat untuk mengembangkan potensi desa wisata tidak terealisasi secara maksimal. Dengan hal tersebut keinginan pemerintah untuk menjadikan desa sebagai destinasi wisata belum optimal. Meskipun adanya peningkatan pengunjung atau wisatawan yang datang ke desa dokan, hal ini disebabkan kepedulian masyarakat desa itu sendiri untuk terus mempertahankan peninggalan budaya yang ada.

Berbagai upaya telah dilakukan masyarakat desa dokan untuk terus mengembangkan pariwisata yang ada seperti, mengadakan festival kebudayaan, mengenalkan alat musik tradisional, mengenalkan tarian tradisional dan pembuatan miniatur rumah adat karo yaitu rumah adat si waluh jabu. Dari pengenalan budaya tersebut masyarakat mampu menarik perhatian wisatawan untuk berkunjung ke desa dokan dan mampu membantu perekonomian masyarakat desa itu sendiri.

Dari uraian diatas penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Evaluasi Peraturan Bupati Karo No 32 Tahun 2019 Tentang Desa Wisata yang dilakukan di Desa Dokan Kecamatan Merek Kabupaten Karo”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian ini, maka permasalahan penelitian yang dapat dirumuskan adalah:

1. Bagaimana Evaluasi Oleh Pemerintah Terkait Peraturan Bupati Karo No 32 Tahun 2019 Tentang Desa Wisata di Desa Dokan Kecamatan Merek Kabupaten Karo?

2. Apa Saja Faktor Penghambat Dalam Mengevaluasi Peraturan Bupati Karo No 32 Tahun 2019 Tentang Desa Wisata di Desa Dokan Kecamatan Merek Kabupaten Karo.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian dari rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Evaluasi Oleh Pemerintah Terkait Peraturan Bupati Karo No 32 Tahun 2019 Tentang Desa Wisata di Desa Dokan Kecamatan Merek Kabupaten Karo?
2. Untuk Mengetahui Apa Saja Faktor Penghambat Dalam Mengevaluasi Peraturan Bupati Karo No 32 Tahun 2019 Tentang Desa Wisata di Desa Dokan Kecamatan Merek Kabupaten Karo.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi Pembangunan ilmu pengetahuan terutama bagi bidang pariwisata, dengan membuka wawasan mengenai pengembangan pariwisata terutama bagi desa wisata.

1.4.2 Manfaat Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran dalam pembangunan bidang ilmu Perencanaan dan Pembangunan khususnya dan ilmu administrasi secara umum serta kebijakan publik dalam melakukan pengembangan pariwisata terutama pada desa wisata. Penelitian ini juga bisa menjadi bahan perbandingan untuk menambah wawasan penelitian berikutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Evaluasi

2.1.1. Defenisi Evaluasi

Evaluasi bisa diartikan sebagai penaksiran atau penelitian. Evaluasi adalah proses menentukan nilai suatu hal atau objek yang berdasarkan pada acuan-acuan tertentu untuk menentukan tujuan tertentu, evaluasi juga bisa diartikan sebagai suatu proses sistematis dalam memeriksa atau menyediakan informasi terhadap program yang dilakukan dan sejauh mana sebuah program tercapai. Evaluasi sangat berguna karena dapat mengetahui tingkatan sesuatu sebagai penilaian terhadap apa yang telah dilakukan dan apa yang akan dilakukan. Menurut Winarno (2013:166), secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut beberapa poin kebijakan seperti implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan.

Menurut William N. Dunn (2003:608-610) istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment) Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya termasuk perumusan masalah

Evaluasi merupakan langkah terakhir dari suatu kebijakan, pengertian evaluasi secara lengkap mencakup tiga pengertian berikut:

1. Evaluasi awal, yaitu proses perumusan kebijakan sampai saat sebelum implementasikan.
2. Evaluasi dalam proses implementasi atau monitoring.
3. Evaluasi akhir yang dilakukan setelah selesai proses implementasi kebijakan.

Evaluasi merupakan proses sistematis yang bertujuan untuk mengukur atau menilai keberhasilan suatu program, kebijakan, atau kegiatan tertentu berdasarkan indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Rossi, Lipsey, dan Freeman (2004:18-35), evaluasi didefinisikan sebagai aktivitas yang dirancang untuk menentukan sejauh mana suatu program mencapai tujuan yang diinginkan, baik dari segi efisiensi, efektivitas, maupun dampaknya terhadap sasaran yang dituju. Menurut Patton (2008:15-28) evaluasi juga dapat dipahami sebagai proses yang melibatkan pengumpulan data secara sistematis untuk menganalisis dan menilai kelebihan, kekurangan, serta rekomendasi perbaikan terhadap suatu program. Evaluasi sering kali dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu evaluasi formatif dan sumatif. Evaluasi formatif fokus pada perbaikan selama pelaksanaan program, sementara evaluasi sumatif bertujuan untuk menentukan keberhasilan akhir program setelah selesai.

2.1.2 Model Evaluasi

William N. Dunn (2003:608-610) mengembangkan model evaluasi kebijakan yang dikenal sebagai bagian dari analisis kebijakan publik. Dunn memandang evaluasi sebagai proses sistematis untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan, program, atau intervensi publik mencapai tujuannya. Dalam model ini, Dunn mengidentifikasi lima kriteria utama evaluasi, yaitu: efektivitas, efisiensi, kecukupan, ketepatan, pemerataan, dan responsivitas. Efektivitas mengukur tingkat pencapaian tujuan kebijakan, sementara efisiensi menilai hubungan antara hasil yang dicapai dengan sumber daya yang digunakan. Kecukupan berspekulasi apakah kebijakan dapat mengatasi masalah utama yang menjadi fokusnya, sedangkan pemerataan menekankan distribusi manfaat yang adil di antara kelompok sasaran. Responsivitas mencerminkan sejauh mana kebijakan memenuhi kebutuhan atau tuntutan publik yang menjadi sasaran kebijakan.

Model ini dirancang untuk menjadi multidimensi, memungkinkan para pengambil keputusan mempertimbangkan berbagai aspek yang saling terkait dalam proses evaluasi. Dunn menekankan bahwa evaluasi harus mencakup analisis data kuantitatif dan kualitatif untuk memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang dampak kebijakan. Selain itu, Dunn menggarisbawahi pentingnya menggunakan berbagai metode, seperti survei, analisis data sekunder, wawancara mendalam, dan studi kasus, guna memastikan keakuratan dan validitas hasil evaluasi. Pendekatan ini memungkinkan evaluasi untuk memberikan informasi yang tidak hanya bersifat teknis tetapi juga relevan secara praktis.

Menurut William N Dunn dalam Muda dan Aulia (2022:140-142)

menyatakan bahwa:

1. Efektivitas, berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakannya. Efektivitas yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis selalu diukur dari produk atau layanan atau nilai moneterinya.
2. Efisiensi, berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan Tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha yang terakhir umumnya diatur dari ongkos moneter.
3. Kecukupan, berkenaan dengan seberapa jauh suatu Tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.
4. Pemerataan, erat hubungan dengan rasionalitas legal dan sosial serta merujuk kepada distribusi akibat dari usaha antar kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi kepada keadilan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan.
5. Responsivitas, berkenaan dengan seberapa jauh kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan dan pemerataan) masih gagal jika belum menanggapi semua kebutuhan actual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari suatu kebijakan.
6. Ketepatan, yaitu secara dekat berhubungan dengan rasionalitas substantif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama.

2.2.Pariwisata

2.2.1 Defenisi Pariwisata

Pariwisata merupakan segala bentuk kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dari satu tempat ke tempat lain diluar lingkungan tempat tinggalnya yang bertujuan untuk rekreasi, hiburan, ataupun pendidikan. Pariwisata melibatkan berbagai unsur seperti atraksi wisata, fasilitas, serta layanan yang mendukung kenyamanan dan kepuasan wisatawan yang berkunjung.

Menurut Yoeti (1996:112) Pariwisata sebenarnya bukan hal yang baru lagi bagi kita. Istilah pariwisata sering dikaitkan dengan “bertamasya”. Tetapi dengan adanya perkembangan di bidang sosial, budaya, dan teknologi maka bentuk dan kegiatannya menjadi lebih kompleks sehingga pada jaman sekarang ini pariwisata merupakan salah satu industri modern. Istilah pariwisata berasal dari Bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua suku kata yaitu pari dan wisata. Pari berarti berulang-ulang atau berkali-kali, sedangkan wisata berarti perjalanan atau berpergian. Jadi pariwisata berarti perjalanan yang dilakukan secara berulang-ulang

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan Bab I pasal 1 dinyatakan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Berdasarkan penjelasan di atas, pada dasarnya wisata mengandung unsur yaitu: Kegiatan perjalanan, dilakukan secara suka rela, bersifat sementara, perjalanan itu seluruhnya atau sebagian bertujuan untuk menikmati objek dan daya tarik wisata.

Berdasarkan beberapa pengertian pariwisata di atas, dapat disimpulkan bahwa pariwisata adalah “suatu kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih yang diselenggarakan dalam jangka waktu yang pendek dari suatu tempat ke tempat yang lain, dengan maksud untuk bertamasya atau rekreasi”. Selain itu, dapat dikatakan bahwa orang yang melakukan perjalanan dalam berwisata akan memerlukan berbagai barang dan jasa sejak mereka pergi dari tempat asalnya sampai di tempat tujuan dan kembali lagi ke tempat asalnya.

2.2.2 Bentuk Pariwisata

Bentuk pariwisata dapat diartikan sebagai jenis kegiatan wisata yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang biasa ditentukan oleh motivasi, tujuan perjalanan ataupun aktivitas yang dilakukan. Bentuk pariwisata juga bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti jarak tempuh atau ketertarikan khusus dari wisatawan, ada yang tertarik dengan wisata alam, ada juga yang tertarik dengan wisata yang lebih bersifat spiritual dan ada wisatawan yang tertarik dengan wisata kearifan lokal seperti peninggalan-peninggalan budaya daerah.

Menurut Pendit (2002:37) bentuk pariwisata dapat dibagi menjadi lima kategori yaitu menurut asal wisatawan, menurut akibatnya terhadap neraca pembayaran, menurut jangka waktu, menurut jumlah wisatawan, dan menurut alat angkut yang digunakan. Bentuk-bentuk pariwisata tersebut adalah:

1. Menurut asal wisatawan

Wisatawan itu bisa berasal dari dalam atau luar negeri. Kalau asalnya dari dalam negeri berarti sang wisatawan hanya pindah tempat sementara di dalam lingkungan wilayah negerinya sendiri dan selama ia mengadakan perjalanan.

2. Menurut akibatnya terhadap neraca pembayaran

Kedatangan wisatawan dari luar negeri adalah membawa mata uang asing. Pemasukan valuta asing ini berarti memberi dampak positif terhadap neraca pembayaran luar negeri suatu negara yang dikunjungi, hal ini disebut pariwisata aktif. Sedangkan kepergian seorang warga negara ke luar negerimemberikan dampak negative terhadap neraca pembayaran luar negerinya, disebut pariwisata pasif.

3. Menurut jangka waktu

Kedatangan seorang wisatawan di suatu tempat atau negara diperhitungkan juga menurut waktu lamanya ia tinggal di tempat atau negara yang bersangkutan. Hal ini menimbulkan istilah-istilah pariwisata jangka pendek dan pariwisata jangka panjang, yang mana tergantung kepada ketentuan-ketentuan yang diberlakukan oleh suatu negara untuk mengukur pendek atau panjangnya waktu yang dimaksudkan.

4. Menurut jumlah wisatawan

Perbedaan ini dilihat atas jumlah wisatawan yang datang, apakah sang wisatawan datang sendiri atau rombongan. Maka timbullah istilah-istilah pariwisata tunggal dan pariwisata rombongan.

5. Menurut alat angkut yang dipergunakan

Dilihat dari segi penggunaan yang dipergunakan oleh wisatawan, maka

kategori ini dapat dibagi menjadi pariwisata udara, pariwisata laut, pariwisata kereta api dan pariwisata mobil, tergantung apakah sang wisatawan tiba dengan pesawat udara, kapal laut, kereta api atau mobil.

2.2.3 Jenis Pariwisata

Jenis pariwisata adalah pengelompokan aktivitas perjalanan atau kunjungan yang dilakukan oleh wisatawan berdasarkan tujuan, minat, dan pengalaman yang ingin dicapai. Jenis wisata terbagi menjadi beberapa bagian seperti wisata alam, budaya, kuliner atau wisata edukasi. Dengan adanya berbagai jenis wisata ini, wisatawan memiliki banyak pilihan sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka.

Menurut Spillane (1991:28-31), jenis pariwisata dibagi menjadi enam yaitu:

1. Pariwisata untuk menikmati perjalanan

Bentuk pariwisata ini dilakukan oleh orang-orang yang meninggalkan tempat tinggalnya untuk berlibur, untuk menikmati udara segar, untuk menenangkan saraf, menikmati keindahan alam, dan lain-lain.

2. Pariwisata untuk rekreasi

Jenis pariwisata ini dilakukan oleh orang-orang yang menghendaki pemanfaatan hari-hari liburnya untuk beristirahat untuk memulihkan kesegaran jasmani dan rohaninya, yang ingin menyegarkan kelelahannya.

3. Pariwisata untuk kebudayaan

Jenis ini ditandai oleh adanya rangkaian motivasi, seperti keinginan untuk belajar di pusat-pusat pengajaran dan riset, untuk mempelajari adat-istiadat, cara hidup rakyat, dan lain-lain.

4. Pariwisata untuk olah raga, dibagi menjadi:

a. *Big sport events*, yaitu pariwisata-pariwisata olah raga besar seperti olimpiade game, kejuaraan tinju dunia, dan lain-lain.

b. *Sporting tourism of the practitioners*, yaitu pariwisata olahraga bagi mereka yang ingin berlatih dan memperaktekkan sendiri, seperti pendakian gunung, rafting, dan berburu.

5. Pariwisata untuk urusan usaha dagang

Jenis pariwisata ini industry pariwisata, tetapi juga mencakup semua kunjungan ke pameran, kunjungan ke instalansi teknis yang bahkan menarik orang-orang luar profesi ini.

6. Pariwisata untuk berkonvensi

Peranan jenis wisata ini makin lama makin penting. Konvensi dan pertemuan bentuk ini sering dihadiri oleh ratusan bahkan ribuan peserta yang biasanya tinggal di beberapa kota atau negara penyelenggara.

2.2.4 Tujuan Pariwisata

Daerah tujuan wisata menurut Surjanto dalam Karyono, (1997:11) yaitu daerah-daerah berdasarkan kesiapan sarana dan prasarana dinyatakan siap menerima kunjungan wisatawan. Daerah tujuan wisata diharuskan memiliki objek wisata dan daya tarik wisata sebagai media untuk menarik wisatawan. Setiap daerah wisata tentunya harus memiliki daya tarik yang berbeda dengan daerah wisata yang lain sehingga wisatawan bukan hanya mendapatkan keindahan yang ditawarkan tetapi bisa mendapatkan ilmu baru bagi wisatawan yang berkunjung, seperti kebudayaan atau kehidupan masyarakat pada daerah tersebut.

Dengan berkembangnya wisata pada suatu daerah akan membawa perubahan pula terhadap kehidupan masyarakat. Perubahan yang didapatkan bisa berupa perubahan positif jika pengembangan pariwisata yang ada mengikuti prosedur yang ada, seperti perencanaan yang terpat dan matang sesuai kondisi wilayah masing-masing daerah wisata. Jika pelaksanaan yang dilakukan secara tidak baik atau tidak mengikuti prosedur yang ada, pengembangan tersebut bisa berbuah negative bagi pengunjung sehingga berdampak buruk terhadap masyarakat di sekitar daerah pariwisata tersebut.

2.2.5 Potensi Wisata

Potensi wisata merupakan segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah atau tempat yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai daya tarik untuk menarik kunjungan wisatawan. Potensi wisata mencakup baik daya tarik yang sudah dikenal maupun yang masih tersembunyi, yang jika dikelola dengan baik dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi masyarakat setempat serta meningkatkan citra daerah tersebut di mata wisatawan.

Menurut Muda, I dkk (2023:1588-1589) Potensi wisata merupakan segala hal dan kejadian yang diatur dan disediakan sehingga dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pariwisata baik berupa suasana, kejadian, benda, maupun jasa. Potensi wisata juga dapat berupa sumber daya alam yang beraneka ragam dari aspek fisik dan hayati, serta kekayaan budaya manusia yang dapat dikembangkan untuk pariwisata.

Menurut Pendit (2004:117), menyebutkan bahwa potensi wisata adalah segala sesuatu yang dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata. Potensi wisata dapat dibagi dua yaitu:

1. Potensi Budaya

Potensi budaya merupakan potensi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, seperti adat-istiadat, mata pencarian, kesenian dan budaya.

2. Potensi Alamiah

Potensi alamiah merupakan potensi yang ada di masyarakat, yang berupa potensi fisik dan geografis seperti alam.

Menurut Darmadjati (2001:128), jadi potensi wisata merupakan segala hal atau keadaan yang bisa digarap, diatur dan disediakan sedemikian rupa sehingga dapat dimanfaatkan atau diwujudkan sebagai salah satu kekuatan atau daya tarik untuk menentukan bagi usaha dan pengembangan kepariwisataan, baik itu berupa suasana, kejadian, benda maupun layanan dan jasa-jasa.

2.3 Pengembangan Pariwisata

2.3.1 Defenisi Pengembangan Pariwisata

Pengembangan pariwisata usaha-usaha yang terkoordinir dilakukan untuk melengkapi pelayanan, infrastruktur guna untuk meningkatkan jumlah wisatawan. Musanef (1995:1) menyatakan bahwa pengembangan pariwisata merupakan segala kegiatan dan usaha yang terkoordinasi untuk menarik wisatawan, menyediakan

semua sarana prasarana, barang dan jasa, fasilitas yang diperlukan guna memenuhi kebutuhan wisatawan. Menurut Pearce (1981:12) Pengembangan pariwisata dapat diartikan sebagai “usaha untuk melengkapi atau meningkatkan fasilitas dan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat”. Pengembangan pariwisata terbagi menjadi 6 komponen yaitu:

1. Atraksi, adalah segala hal yang mampu menarik wisatawan untuk berkunjung ke kawasan wisata. Atraksi terdiri dari apa yang pertama kali membuat wisatawan tertarik untuk berkunjung ke sebuah kawasan. Atraksi dapat didasarkan pada sumber daya alam yang memiliki bentuk ciri-ciri fisik alam, dan keindahan kawasan itu sendiri. Selain itu, budaya juga dapat menjadi atraksi untuk menarik minat wisatawan datang, seperti hal-hal yang bersejarah, agama, cara hidup masyarakat, tata cara pemerintahan, dan tradisi-tradisi masyarakat baik dimasa lampau maupun di masa sekarang. Hampir setiap destinasi memiliki atraksi khusus yang tidak dapat dimiliki oleh destinasi lainnya.
2. Akses, akses mencakup fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh wisatawan untuk menuju destinasi wisata, sehingga harus tersedia jasa seperti penyewaan kendaraan dan transportasi lokal, rute atau pola perjalanan.
3. Fasilitas Pendukung, fasilitas pendukung merupakan hal-hal yang dibutuhkan wisatawan dalam destinasi wisata untuk memenuhi kebutuhan akomodasi, penyediaan makanan, minuman, tempat hiburan, tempat perbelanjaan dan layanan lainnya seperti bank, rumah sakit, keamanan dan asuransi.
4. Penginapan (akomodasi), Akomodasi dapat diartikan sebagai penginapan yang tentunya di satu destinasi dengan destinasi lainnya akan berbeda. Akomodasi yang umum dikenal adalah hotel dengan beragam fasilitas didalamnya. Akomodasi di desa wisata berbeda dengan akomodasi di destinasi lain. Akomodasi di desa wisata biasanya terdiri dari sebagian tempat tinggal para penduduk setempat atau unit-unit yang berkembang atas konsep tempat tinggal penduduk atau biasa dikenal dengan homestay. Akomodasi untuk mendukung terselenggaranya kegiatan wisata di destinasi dapat terletak di lokasi desa wisata tersebut atau berada di dekat desa wisata. Jenis akomodasi di desa wisata dapat berupa bumi perkemahan, villa atau sebuah pondok wisata.
5. Aktivitas, aktivitas wisata di destinasi merupakan kegiatan yang salah satunya menjadi daya tarik wisatawan untuk datang ke destinasi. Begitu juga dengan desa wisata, jenis aktivitas yang dilakukan berhubungan dengan karakteristik desa tersebut. Aktivitas yang umumnya dilakukan di desa wisata adalah mengikuti kegiatan

- kehidupan sehari-hari desa wisata.
6. Layanan Pendukung, layanan pendukung dapat berupa dukungan yang disediakan oleh organisasi, pemerintah daerah, kelompok atau pengelola destinasi wisata.

2.3.2 Pengembangan Daerah Tujuan Wisata

Menurut Yoeti (1996:53) Pengembangan adalah suatu proses atau cara menjadikan sesuatu menjadi maju, baik sempurna dan berguna. Yoeti menegaskan bahwa pengembangan suatu produk pada dasarnya adalah usaha yang dilakukan secara sadar dan berencana untuk memperbaiki produk yang sedang berjalan dan menambah jenis produk yang dihasilkan ataupun yang akan dipasarkan. Pengembangan suatu objek wisata harus dapat menciptakan produk style yang baik, dimana diantaranya adalah:

1. Objek tersebut memiliki daya tarik untuk disaksikan maupun dipelajari.
2. Mempunyai kekhususan dan berbeda dari objek yang lainnya.
3. Tersedianya fasilitas wisata.
4. Dilengkapi dengan sarana-sarana akomodasi, telekomunikasi, transportasi, dan sarana pendukung lainnya.

Pengembangan objek wisata pada dasarnya mencakup tiga hal yaitu:

1. Pembinaan produk wisata
Merupakan usaha meningkatkan mutu pelayanan dan sebagai unsur produk pariwisata seperti jasa akomodasi, jasa transportasi jasa hiburan, jasa tour dan travel serta pelayanan di objek wisata. Pembinaan tersebut dilakukan dengan berbagai kombinasi usaha seperti pendidikan dan latihan, pengaturan dan pengarahan pemerintah, pemberian rangsangan agar tercipta iklim persaingan yang sehat guna mendorong peningkatan mutu produk dan pelayanan.
2. Pembinaan masyarakat wisata
Adapun tujuan pembinaan masyarakat pariwisata adalah sebagai berikut:
 - a. Menggalakkan pemeliharaan segi-segi positif dari masyarakat
 - b. yang langsung maupun tidak langsung yang bermanfaat bagi pengembangan pariwisata.
 - c. Mengurangi pengaruh buruk akibat dari pengembangan pariwisata.
 - d. Pembinaan kerja sama baik berupa pembinaan produk wisata, pemasaran dan pembinaan masyarakat.
3. Pemasaran terpadu

Dalam pemasaran pariwisata digunakan prinsip-prinsip panduan pemasaran terpadu yang meliputi.

- a. Paduan produk yaitu semua unsur produk wisata seperti atraksi seni budaya, hotel dan restoran yang harus ditumbuh kembangkan sehinggamampu bersaing dengan produk wisata lainnya.
- b. Paduan penyebaran yaitu pendistribusian wisatawan pada produk wisata yang melibatkan biro perjalanan, penerbangan, dan angkutan darat.
- c. Paduan komunikasi artinya diperlukan komunikasi yang baik sehingga dapat memberikan informasi tentang tersedianya produk yang menarik.
- d. Paduan pelayanan yaitu jasa pelayanan yang diberikan kepada wisatawan harus baik sehingga produk wisata akan baik pula.

2.4 Kearifan Lokal

2.4.1 Defenisi Kearifan Lokal

Kearifan lokal menurut UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bab I Pasal 1 butir 30 adalah “nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari”. Selanjutnya Ridwan (2007: 2) memaparkan kearifan lokal atau sering disebut local wisdom dapat dipahami sebagai usaha manusia dengan menggunakan akal budinya (kognisi) untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu.

Pengertian tersebut, disusun secara etimologi, dimana kearifan lokal (local wisdom) terdiri dari dua kata, yaitu kearifan (wisdom) dan lokal (local). Kearifan (wisdom) berarti kemampuan seseorang dalam menggunakan akal pikirannya untuk menyikapi suatu kejadian, obyek atau situasi. Lokal menunjukkan ruang interaksi dimana peristiwa atau situasi tersebut terjadi. Kearifan lokal merupakan perilaku positif manusia dalam berhubungan dengan alam dan lingkungan sekitarnya yang dapat bersumber dari nilai agama, adat-istiadat, petuah nenek moyang atau budaya

setempat yang terbangun secara alamiah dalam suatu komunitas masyarakat untuk beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya. Perilaku yang bersifat umum dan berlaku di masyarakat secara meluas dan turun-temurun akan berkembang menjadi nilai-nilai yang dipegang teguh, yang disebut sebagai kebudayaan (budaya).

Menurut Apriyanto (2008: 4), menurut perspektif kultural, kearifan lokal adalah berbagai nilai yang diciptakan, dikembangkan dan dipertahankan oleh masyarakat yang menjadi pedoman hidup mereka, termasuk berbagai mekanisme dan cara untuk bersikap, bertingkah laku dan bertindak yang dituangkan sebagai suatu tatanan sosial. Pernyataan tersebut terlihat bahwa terdapat lima dimensi kultural tentang kearifan lokal, yaitu:

- a. Pengetahuan lokal, yaitu informasi dan data tentang karakter keunikan lokal serta pengetahuan dan pengalaman masyarakat untuk menghadapi masalah serta solusinya. Pengetahuan lokal penting untuk diketahui sebagai dimensi kearifan lokal sehingga diketahui derajat keunikan pengetahuan yang dikuasai oleh masyarakat setempat untuk menghasilkan inisiasi lokal.
- b. Budaya lokal, yaitu yang berkaitan dengan unsur-unsur kebudayaan yang telah terpola sebagai tradisi lokal, yang meliputi sistem nilai, bahasa, tradisi, teknologi.
- c. Keterampilan lokal, yaitu keahlian dan kemampuan masyarakat setempat untuk menerapkan dan memanfaatkan pengetahuan yang dimiliki.
- d. Sumber lokal, yaitu sumber yang dimiliki masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan melaksanakan fungsi-fungsi utamanya.
- e. Proses sosial lokal, berkaitan dengan bagaimana suatu masyarakat dalam menjalankan fungsi-fungsinya, sistem tindakan sosial yang dilakukan, tatahubungan sosial serta kontrol sosial yang ada.

2.4.2 Ciri dan Fungsi Kearifan Lokal.

Kearifan lokal merupakan usaha untuk menemukan kebenaran yang didasarkan pada fakta-fakta atau gejala-gejala yang berlaku secara spesifik dalam sebuah budaya masyarakat tertentu. Menurut Ayatrohaedi (1986: 40) mengatakan bahwa unsur budaya daerah potensial sebagai local genius karena telah teruji

kemampuannya untuk bertahan sampai sekarang. Ciri-cirinya adalah:

- a. Mampu bertahan terhadap budaya luar
- b. Memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar
- c. Mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli
- d. Mempunyai kemampuan mengendalikan
- e. Mampu memberi arah pada perkembangan budaya

Unsur-unsur kebudayaan universal begitu lekat digunakan yang juga dapat dianggap sebagai kearifan lokal suatu daerah seperti, bahasa system pengetahuan, organisasi sosial (system hukum, system perkawinan), sistem peralatan hidup dan teknologi (pakaian, perumahan, senjata dan sebagainya, sistem mata pencaharian hidup (pertanian, peternakan, dan sistem produksi), sistem religi (sistem kepercayaan), dan kesenian (seni rupa, seni suara, seni gerak dan sebagainya). Kearifan lokal disini dapat dilihat sebagai sesuatu yang berkaitan secara spesifik dengan budaya tertentu (budaya lokal) dan mencerminkan cara hidup suatu masyarakat tertentu (masyarakat lokal). Budaya lokal itu merupakan suatu budaya yang dimiliki suatu masyarakat yang menempati lokalitas atau daerah tertentu yang berbeda dari budaya yang dimiliki oleh masyarakat yang berada di tempat lain.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya memegang peranan yang sangat penting dalam proses pelaksanaan suatu kajian ilmiah, karena dapat memberikan dasar pijakan yang kuat, baik dari segi teori, pendekatan, maupun metode yang digunakan.

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

N o	Nama, Tahun	Judul	Hasil	Perbedaan
1	Puji Assifa Kurniawan, Gunawan Undang (2023)	Evaluasi Kebijakan dan Pelaksanaan Program Desa Wisata di Kawasan Pariwisata Situ Ciburuy Desa Ciburuy	Hasil penelitian menjelaskan bahwa kelembagaan seperti Pokdarwis desa ciburuy yang memberikan pemberdayaan kepada masyarakat terkait pariwisata juga belum melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai peraturan yang ada. Akibat dari semua itu adanya situ ciburuy belum dapat memberikan kesejahteraan dan peningkatan ekonomi kepada masyarakat sekitar dimana ini kebalikan dari tujuan dari adanya desa wisata di desa ciburuy yang menurut peraturan daerah kabupaten bandung barat no 7 tahun 2013 tentang perencanaan kepariwisataan daerah pasal 3 ayat 1 dan 2 adalah penyelenggaraan kepariwisataan daerah yang bertujuan meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.	Penelitian ini memfokuskan peraturan kepada kelembagaan Pokdarwis desa ciburuy sebagai organisasi sedangkan penelitian saya berisi tentang peran pemerintah daerah terhadap pariwisata desa.
2	Irpan Suriadita (2024)	Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perda ini sudah memberikan kerangka yang jelas namun dalam pengimplementasiann	Penelitian terdahulu menjelaskan bahwa faktor penghambat dari perkembanga

		10 Tahun 2021 Tentang Desa Wisata:Strategi Pengembangan Berkelanjutan	ya belum optimal yang dimana memiliki beberapa faktor penghambat seperti keterbatasan SDM, minimnya pendampingan teknis dan belum maksimalnya promosi potensi dari desa wisata, yang dimana untuk mengatasi hal tersebut diperlukan langkah strategis seperti peningkatan kapasitas pengelola desa melalui pelatihan, penguatan koordinasi antar pihak terkait, dan pemanfaatan teknologi digital dalam pengenalan potensi desa wisata.	n desa wisata dikarenakan keterbatasan SDM yang dimana penelitian saya dihambat karena kurangnya partisipasi dari pemimpin daerah terhadap desa wisata itu sendiri.
3	Indira Aprilia Salsabila, R.Slamet Santoso (2023)	Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Desa Wisata Jatirejo Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang	Dalam pelaksanaan program budaya tidak menhambat pelaksanaan dikarenakan tidak ada perubahan kebiasaan nilai dan norma oleh masyarakat sehingga aspek budaya tidak berpengaruh pada pelaksanaan program	Penelitian terdahulu membahas tentang wisata alam yang kurang menarik perhatian pengunjung, sedangkan penelitian saya membahas tentang wisata budaya yang ada di desa Dokan.
4	Rizky Raynaldi, Ruslan Budiarto, Fitri Rahmafitri a (2024)	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun	Untuk mencapai kesuksesan dalam dalam pengembangan desa wisata diperlikan kerja sama atara pemerintah, masyarakat lokal, dan	Penelitian terdahulu mejelaskan tentang kurangnya keterlibatan masyarakat

		2023 Tentang Desa Wisata di Desa Karedok Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang	pihak-pihak terkait lainnya. Keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan pariwisata adalah kunci utama dalam memastikan keberlanjutan dan keberhasilan desa wisata	secara langsung terhadap pengembangan wisata desa, sedangkan penelitian saya melihat keterlibatan pemerintah secara langsung
5	Tesar Afianggit, Mutiar Fitri Dewi (2024)	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Desa Wisata di Desa Somongari	Keberhasilan suatu kebijakan didukung oleh adanya komitmen yang baik antara pelaksana kebijakan, komunikasi yang efektif, dan tingginya kesadaran masyarakat desa somogari terkait pengembangan desa wisata. Adapun faktor penghambat yaitu kurangnya pemahaman pelaksanaan kebijakan terhadap peraturan daerah nomor 15 tahun 2019 tentang desa wisata, serta pengelolaan dana desa yang belum optimal dan minimnya dukungan anggaran untuk pembangunan fasilitas penunjang.	Penelitian terdahulu melakukan penelitian di desa somogari sedangkan saya melakukan penelitian di desa dokan kecamatan merek kabupaten karo yang tentunya memiliki perbedaan wisata dan kebudayaan

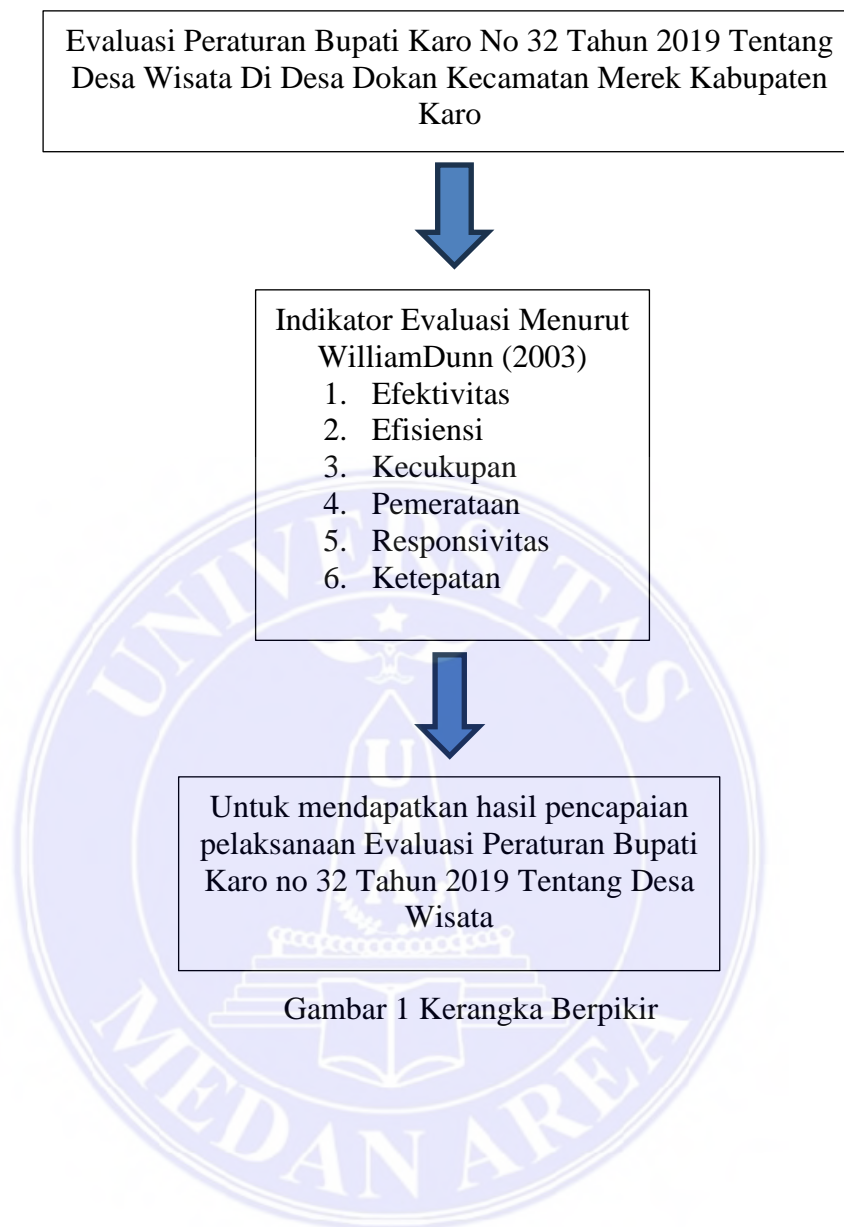
2.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir dibuat berupa skema sederhana yang menggambarkan secara singkat proses pemecahan masalah yang dikemukakan oleh peneliti. Skema sederhana yang dibuat kemudian dijelaskan secukupnya mengenai mekanisme kerja faktor-faktor yang timbul. Dengan demikian gambaran jalannya penelitian

secara keseluruhan dapat diketahui secara jelas dan terarah (Cholid Nurbuko,2010). Dapat diartikan kerangka berpikir merupakan suatu pola pikir tentang hubungan antar variabel atau masalah serta peristiwa yang mewakili hipotesis dalam sebuah penelitian.

Pada lokasi penelitian yang telah ditentukan di Desa Dokan Kecamatan Merek Kabupaten Karo untuk Mengevaluasi Peraturan Bupati Karo No 32 Tahun 2019 Tentang Desa Wisata, maka peneliti menggunakan teori William N Dunn (2003) yang dimana dalam teori tersebut memiliki 6 indikator yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Dari penelitian ini dapat dilihat bagaimana keefektifan evaluasi Peraturan Bupati Karo No 32 Tahun 2019 Tentang Desa Wisata serta apa saja faktor penghambat dalam pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal di desa dokan kecamatan merek kabupaten karo.

Adapun kerangka berpikir pada penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:79) Penelitian mempunyai peran penting guna meningkatkan pengetahuan, rasaingin tahu yang berasal dari masalah yang timbul kemudian harus dirumuskan dandibahas dengan cara mengamati, meneliti atau mencari suatu kebenaran secara sistematis dalam waktu tertentu dengan menggunakan metode ilmiah sesuai aturanyang berlaku.

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti status manusia, suatu objek, suatu situasi dan kondisi, sistem pemikiran pada masa sekarang. Dengan menggunakan bentuk penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif bertujuan untuk menggali fakta Evaluasi Pengembangan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal Di Desa Dokan Kecamatan Merek Kabupaten Karo.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini direncanakan di Kantor Kepala Desa Dokan Kecamatan Merek Kabupaten Karo yang ber alamat di jalan Kabanjahe-Merek KM 9 Kecamatan Merek Kabupaten Karo Sumatera Utara 22452.

3.2.2 Waktu Penelitian

Penelitian tentang Evaluasi Pengembangan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal Di Desa Budaya Dokan Kecamatan Merek Kabupaten Karo dilaksanakan pada bulan Maret 2025

Tabel 2 Waktu Peneilitian

No	Uraian Kegiatan	O kt 202 4	Nov 202 4	Des 202 4	Jan 202 5	Feb 202 5	Mar 202 5	Apr 202 5	Mei 202 5	Jun 202 5	Juli 202 5	Ags t 202 5
1	Pengajuan Judul											
2	Penyusunan Proposal											
3	Seminar Proposal											
4	Perbaikan Proposal											
5	Pengambilan Data Penelitian											
6	Penyusunan Skripsi											
7	Seminar Hasil											
8	Perbaikan Skripsi											
9	Sidang Meja Hijau											

3.3. Informan Penelitian

Menurut Arikunto (2002:120) Pada penelitian ini penentuan informan dalam penelitian, peneliti menggunakan teknik Purposive Sampling yaitu dengan cara pengambilan subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi

didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Pemilihan Purposive sampling berdasarkan atas pertimbangan tertentu, dimana pemilihan informan utama dalam penelitian ini dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan atau dalam penelitian ini palintahu bagaimana perkembangan pariwisata di daerah tersebut terutama dalam pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal.

Adapun kriteria informan penelitian adalah:

1. Informan Utama, Informan utama adalah seseorang atau kelompok yang dijadikan sebagai sumber data pada penyampaian informasi terkait penelitian. Informan utama dapat juga diartikan sebagai narasumber yang dapat memberikan gambaran permasalahan yang ada dalam penelitian. Adapun informan utama dalam penelitian ini adalah bapak kepala desa dokan Martinus Sembiring.
2. Informan Kunci, Informan kunci adalah individu yang memiliki pengetahuan keseluruhan tentang permasalahan yang ada dalam penelitian. Informan kunci tidak hanya mengetahui tentang gambaran, tetapi mengetahui secara detail dan terperinci apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian. Adapun informan kunci dalam penelitian ini adalah, pemangku adat desa dokan.
3. Informan Tambahan, Informan tambahan adalah individu tau kelompok yang menjadi isu skunder dalam menyampaikan gambaran pendukung. Informan tambahan ini merupakan orang yang memberikan isu tambahan yang menjadi pelengkap dalam pembahasan penelitian. Adapun informan tambahan dalam penelitian ini adalah masyarakat desa dokan dan wisatawan yang berkunjung ke desa dokan.

Informan Utama

Kepala Desa : Martinus Sembiring

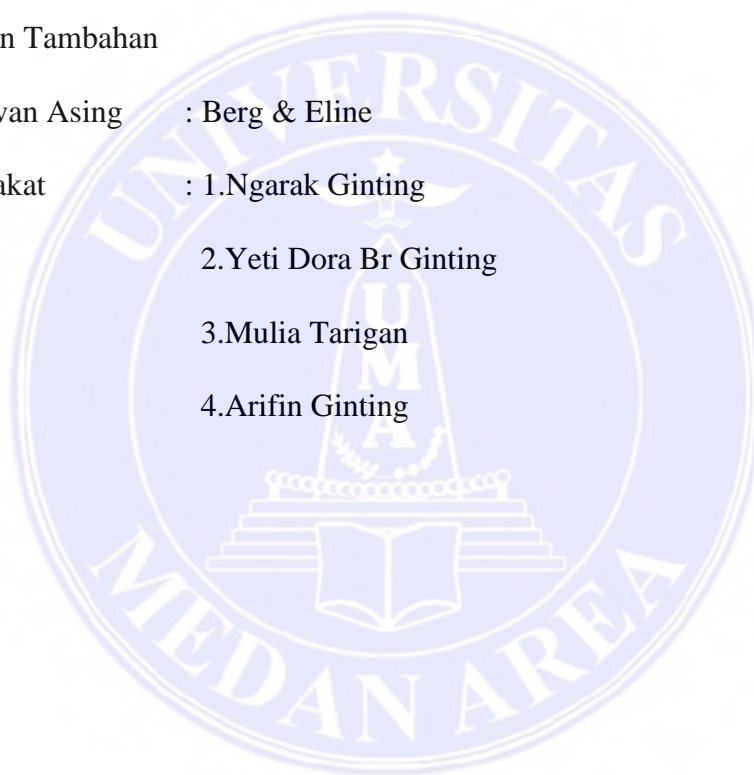
Informan Kunci

Pemangku Adat : 1.Ukur Br Sembiring
2.Rimenda Br Sembiring
3.Matius Ginting

Informan Tambahan

Wisatawan Asing : Berg & Eline

Masyarakat : 1.Ngarak Ginting
2.Yeti Dora Br Ginting
3.Mulia Tarigan
4.Arifin Ginting



3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut Noor (2011:138) merupakan cara pengumpulan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Teknik pengumpulan data merupakan hal yang paling penting untuk dilakukan dalam penelitian, karena hal ini bertujuan untuk mendapatkan data-data penelitian. Dalam penelitian ini diperlukan data atau keterangan dan informasi.

Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dari lapangan. observasi dilakukan dengan proses pengamatan terlebih dahulu kemudian mencatat data yang diperoleh secara logis, sistematis, objektif, dan rasional terhadap fenomena yang terjadi dalam situasi yang sebenarnya. Teknik observasi atau pengamatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan pancainderanya. Kunci keberhasilan observasi sebagai Teknik pengumpulan data sangat banyak ditentukan dengan melakukan pengamat sendiri, kemudian menyimpulkan dari apa yang diamati itu.

2. Wawancara

Menurut Yusuf (2014:372), Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam suatu penelitian. Wawancara adalah suatu proses yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dari penelitian, wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dengan responden. Wawancara yang

dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, peneliti telah menyiapkan pertanyaan yang akan diajukan kepada pihak yang diwawancarai. Data yang diperoleh dari wawancara umumnya berbentuk pernyataan yang berhubungan dengan pokok permasalahan, wawancara dilakukan secara mendalam untuk memperoleh data melalui serangkaian pertanyaan dengan pihak Desa Dokan.

3. Dokumentasi

Menurut Yusuf (2014:384), Teknik dokumentasi adalah tata cara pengumpulan data dengan mencatat data data yang sudah ada didapatkan dari informan-informan terkait permasalahan yang diteliti. Teknik dokumentasi adalah metode untuk mengumpulkan data yang digunakan dan menelusuri data historis. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang yang ada didalam suatu peristiwa, atau kejadian pada situasi sosial yang sangat berguna dalam melakukan penelitian kualitatif.

4. Triangulasi

Menurut Nugrahani, (2014:179), Triangulasi merupakan teknik yang digunakan untuk melakukan pengecekan data yang telah didapatkan untuk meyakinkan bahwa data yang diperoleh dapat menjamin keabsahan dan validitas data dari topik penelitian yang dilakukan. Triangulasi ialah pendekatan yang menggabungkan berbagai Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti saat mengumpulkan dan menganalisis data. Pada dasarnya peristiwa yang sedang diteliti

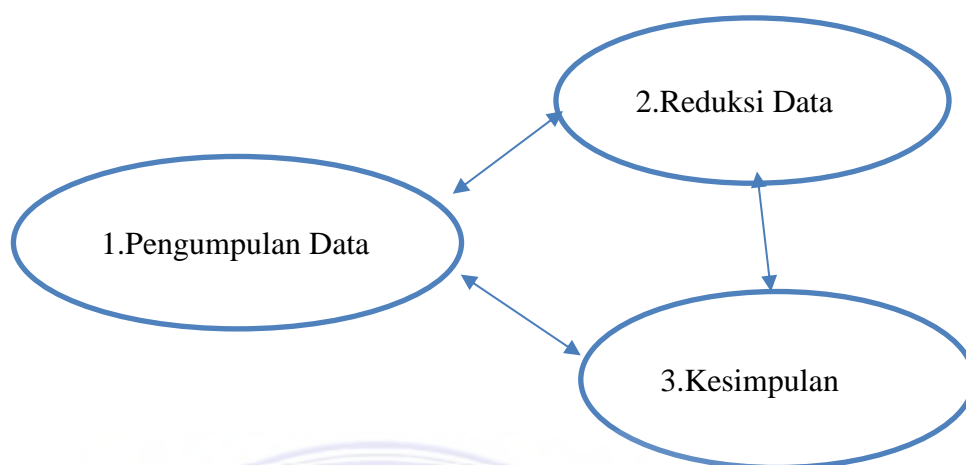
dapat dipahami dengan baik sehingga ditemukan kebenaran yang akurat dan valid jika dilihat dari perspektif, dan sumber informasi yang berbeda. Teknik triangulasi digunakan untuk mendapatkan satu hasil data dengan sumber yang berbeda akan tetapi data yang didapatkan memiliki tingkat kebenaran yang tinggi. Manfaat yang didapatkan dari menggunakan teknik triangulasi ini dalam melakukan sebuah penelitian adalah untuk memperbaiki kesalahan yang sering terjadi pada instrument penelitian, triangulasi juga dapat meningkatkan kepercayaan dari hasil penelitian, sehingga dapat mengembangkan pertanyaan ulasan untuk menggali data lebih mendalam.

3.5 Teknik Analisis Data

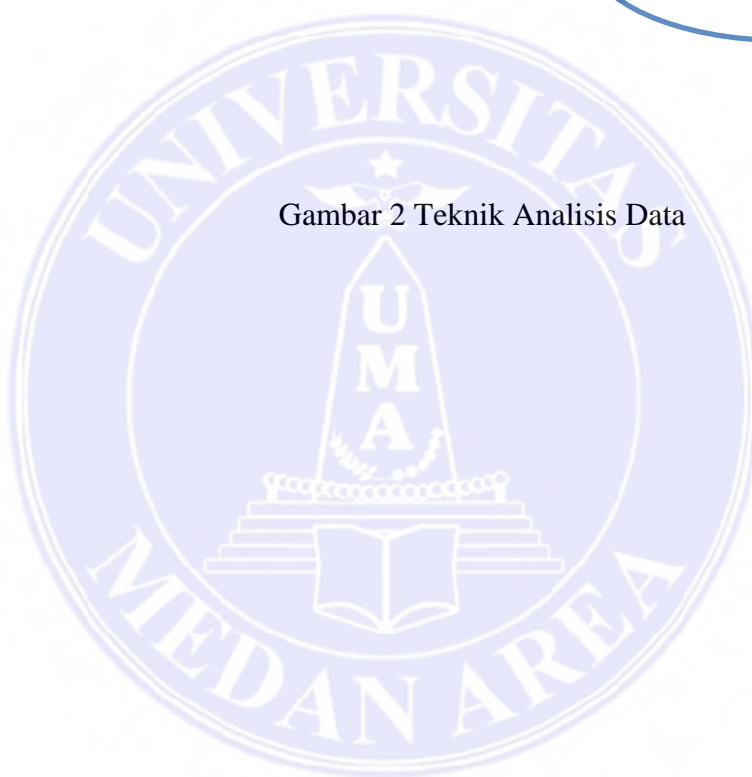
Analisis data dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkap makna yang tersembunyi dalam data yang telah dikumpulkan. Data mentah yang diperoleh dari penelitian kemudian diolah dan diorganisasikan sedemikian rupa sehingga lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Tujuan akhirnya adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian atau membuktikan hipotesis yang diajukan. Dengan kata lain, analisis data membantu peneliti untuk menemukan pola, tema, dan kategori dalam data sehingga menghasilkan temuan yang lebih jelas dan bermakna. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang dipelajari.

Berikut ini teknik analisis data interaktif menurut Sugiyono (2013:110), yaitu:

1. Pengumpulan Data, pengumpulan data pertama-tama dimulai dengan menggali data dari berbagai sumber, yaitu dengan indepth interview dan observasi, yang kemudian dituliskan dalam catatan lapangan dengan memanfaatkan dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan dua metode yaitu dengan indepen interview dan observasi.
2. Reduksi data, dengan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan pola nya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer, dengan memberikan kode-kode pada aspek tertentu.
3. Penarikan Kesimpulan sebagai langkah akhir dalam analisa data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulandata.



Gambar 2 Teknik Analisis Data



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai evaluasi Peraturan Bupati Karo No 32 Tahun 2019 tentang Desa Wisata di Desa Dokan Kecamatan Merek Kabupaten Karo, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan peraturan tersebut belum berjalan secara optimal.

1. Peraturan ini memang dirancang untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi wisata serta memberdayakan masyarakat dalam mengelola potensi wisata berbasis kearifan lokal. Namun dalam praktiknya belum terlaksana dengan baik, baik dari segi efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, serta responsivitas dari peraturan bupati itu sendiri di desa Dokan. Dari segi ketepatan kebijakan ini sudah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat, tapi untuk mencapai tujuan dari kebijakan tersebut diperlukan perhatian lebih dari pemerintah daerah sebagai penggerak utama dalam pembangunan pariwisata desa.
2. Faktor penghambat yang paling dominan dalam pelaksanaan evaluasi dan pengembangan pariwisata di Desa Dokan adalah minimnya dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait serta rendahnya partisipasi masyarakat. Dukungan yang minim dari pemerintah terlihat dari terbatasnya anggaran, kurang optimalnya promosi wisata, dan minimnya pendampingan teknis, yang berakibat pada kurang terintegrasinya berbagai sumber daya dan pendukung program. Sementara itu, partisipasi masyarakat yang masih rendah disebabkan oleh kurangnya pemahaman akan manfaat langsung

pengembangan wisata, kurang meratanya ketertarikan terhadap program, rasa apatisme, serta hambatan sosial dan budaya. Ketimpangan ini menyebabkan tanggung jawab pengelolaan wisata menjadi terbatas pada kelompok tertentu saja, sehingga potensi yang ada tidak dapat dikembangkan secara merata dan maksimal. Hambatan ini semakin diperkuat oleh terbatasnya akses informasi, pelatihan, dan ketidakmerataan kesempatan yang dialami oleh kelompok rentan dalam masyarakat.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati Karo No 32 Tahun 2019 tentang Desa Wisata dalam pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal di Desa Dokan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas pengembangan pariwisata dan mengatasi kendala yang ada.

1. Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan dukungan secara nyata, baik dari segi anggaran, sumber daya, maupun fasilitasi teknis. Pemerintah perlu mengalokasikan dana yang cukup khususnya untuk program-program pengembangan desa wisata serta memperkuat peran dinas pariwisata dalam melakukan promosi dan pemasaran destinasi wisata Desa Dokan secara lebih intensif dan terintegrasi. Selain itu, pendampingan kepada masyarakat harus lebih diperkuat agar pengelolaan wisata dapat dilakukan dengan lebih profesional dan berkelanjutan.
2. Perlunya peningkatan partisipasi masyarakat secara menyeluruh melalui pendekatan pemberdayaan yang inklusif. Pemerintah bersama lembaga

terkait harus menyelenggarakan sosialisasi, pelatihan, dan edukasi yang berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal. Hal ini penting agar seluruh elemen masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti perempuan dan pemuda, dapat berperan aktif dalam pengembangan dan pengelolaan desa wisata.

3. Pemerintah dan pemangku kepentingan berupaya membangun sinergi dan koordinasi yang lebih baik antara berbagai pihak yang terlibat, seperti pemerintah desa, pemerintah kabupaten, lembaga swadaya masyarakat, komunitas lokal, dan sektor swasta. Sinergi ini penting untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi yang ada sehingga pengembangan desa wisata dapat berjalan secara terarah dan berkelanjutan.
4. pengembangan pariwisata desa ini harus tetap mengutamakan pelestarian budaya dan lingkungan desa seperti penyediaan infrastuktur seperti pembangunan jalan, pembangunan kamar mandi umum atau pembangunan destinasi wisata buatan untuk lebih menarik pandangan wisatawan. Program-program pengembangan wisata harus dirancang agar tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga menjaga nilai-nilai kearifan lokal serta ekosistem lingkungan agar warisan budaya dan alam desa tetap terjaga untuk generasi mendatang. Dengan penerapan saran-saran tersebut, diharapkan pengembangan berbasis pariwisata berbasis kearifan lokal di Desa Dokan dapat semakin maju.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Apriyanto, Y. dkk. (2008). *“Kearifan Lokal Dalam Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Air Yang Berkelanjutan”*. Erlangga.
- Arikunto, S. 2002. *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ayatrohaedi, 1986, *Kepribadian Budaya Bangsa (local genius)*, Pustaka Jaya, Jakarta
- Darmadjati, P. (2001). *Potensi dan Pengelolaan Pariwisata Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Dunn, W. N. (2003). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Karyono, S. (1997). *Kepariwisata dalam Ekonomi Modern*. Jakarta: UI Press.
- Musanef (1995), *Manajemen Pariwisata di Indonesia*. Jakarta, Gunung Harta. Jakarta, Pradaya Paramita.
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*
- Muda, I., & Aulia, S. (2022). *Implementasi dan evaluasi Kebijakan Publik*. Medan UMA Press.
- Pearce, D. 1981. *Tourism a Community Approach*. 2nd: Harlow Longman.
- Pendit, N. S. (2002). *Ilmu Pariwisata: Sebuah Pengantar Perdana*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Saraswaty, R. (2017). *Kearifan Lokal dalam Pariwisata Berkelanjutan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sitanggang, T. (1991). *Tradisi Adat Karo dan Rumah Adat Siwaluh Jabu*. Medan: Balai Pustaka.
- Stufflebeam, D. L., & Shinkfield, A. J. (2007). *Evaluasi Program: Perspektif Baru*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Winarno, Budi, 2013. *Kebijakan publik: Teori, proses dan studi kasus*, cetakan

pertama, edisi dan revisi terbaru, Yogyakarta. CAPS

Yoeti, O. A. (1996). *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: Alfabeta.

Referensi Jurnal

Affiangit, T., & Dewi, MF (2024). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Desa Wisata di Desa Somongari. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 14 (2), 181-195.

Ginting, S. (2013). "Tradisi dan Kearifan Lokal Suku Karo: Studi Kasus di Desa Dokan, Kabupaten Karo." *Jurnal Antropologi Indonesia*, 34(2), 120–135.

Kurniawan, P., & Kurniawan, P. (2023). Evaluasi Kebijakan Dan Pelaksanaan Program Desa Wisata Di Kawasan Pariwisata Situ Ciburuy Desa Ciburuy. *Jurnal Perceka*, 1(1), 24-28.

Muda, I. M., Angelia, N., & Pulungan, W. (2023). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Potensi Wisata Desa Guru Singa Kabupaten Tanah Karo. *Jurnal SOLMA*, 12(3), 1588-1596.

Patton, M. Q. (2008). "Qualitative Evaluation Methods for Program Impact Assessment." *Evaluation Journal of Australasia*, 24(4), 15–28.

Raynaldi, R., Budiarto, R., & Rahmafitria, F. (2024). Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Desa Wisata di Desa Karedok Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang. *Media Wisata*, 22 (1), 145-157.

Ridwan (2007). Landasan Keilmuan Kearifan Lokal. *Jurnal Studi Islam dan Budaya*. 1(V). 27-38.

Rossi, P. H., Lipsey, M. W., & Freeman, H. E. (2004). "Evaluation: A Systematic Approach." *Policy Sciences Review*, 26(1), 18–35.

Salsabila, I. A., & Santoso, R. S. (2025). EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN DESA WISATA JATIREJO KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG. *Journal of Public Policy and Management Review*, 14(2), 667-683.

Saraswaty, R. (2017). "Pengaruh Rumah Adat Siwaluh Jabu dalam Pembangunan Pariwisata Berbasis Budaya." *Jurnal Budaya dan Pariwisata Indonesia*, 12(1), 45–56

Suriadiata, I. (2024). Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Desa Wisata: Strategi Pengembangan Berkelanjutan. Jurnal Ilmiah Pengabdian dan Inovasi, 3(2), 143-154.

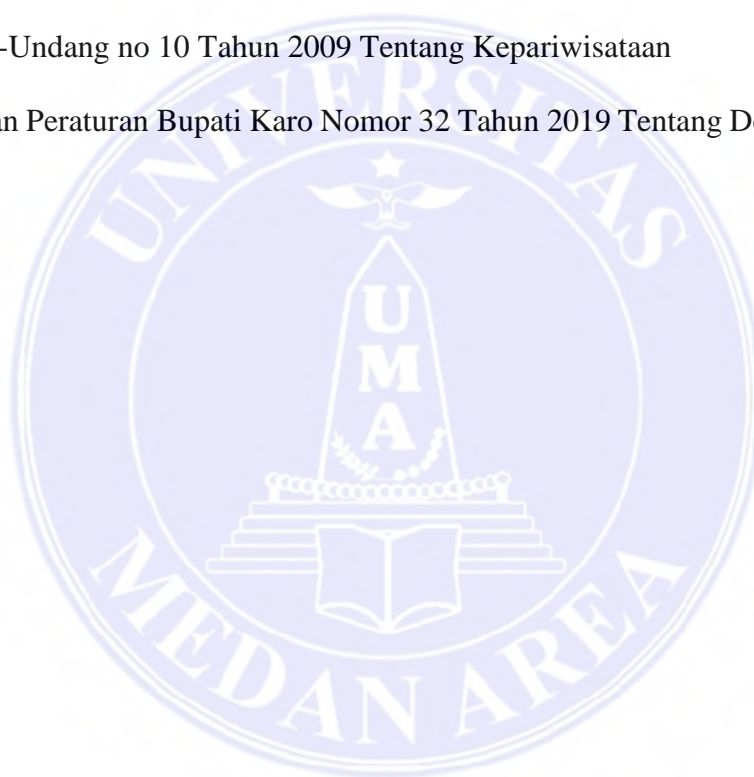
Spillane, J. J. (1991). "Jenis dan Bentuk Pariwisata: Perspektif Global." Jurnal Kepariwisata Indonesia, 5(3), 28–31.

Stufflebeam, D. L., & Shinkfield, A. J. (2007). "Educational Program Evaluation Models: A Comparative Analysis." Journal of Policy Analysis and Management, 19(2), 205–230.

Perundang – undangan

Undang-Undang no 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

Peraturan Peraturan Bupati Karo Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Desa Wisata



Tabel 6 Pedoman Wawancara

No	Informan Penelitian	Aspek berdasarkan Teori William Dunn	Pertanyaan
1.	Informan Utama	<p>Efektivitas</p> <p>Efisiensi</p> <p>Kecukupan</p> <p>Pemerataan</p> <p>Responsivitas</p> <p>Ketepatan</p>	<p>1.Apakah Peraturan Bupati Karo No. 32 Tahun 2019 telah mencapai tujuan utamanya dalam mengembangkan desa wisata berbasis kearifan lokal?</p> <p>2.Bagaimana dampak kebijakan ini terhadap peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Desa Dokan?</p> <p>3.Seberapa besar peran pemerintah desa dalam memastikan keberhasilan kebijakan ini?</p> <p>1.Apakah anggaran dan sumber daya yang tersedia sudah cukup untuk menjalankan program pengembangan desa wisata ini?</p> <p>2.Apakah ada upaya untuk meningkatkan efisiensi dalam penggunaan dana desa dalam mendukung pengembangan wisata?</p> <p>1.Apakah kebijakan ini sudah mencakup semua aspek yang diperlukan dalam pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal?</p> <p>2.Apakah ada regulasi tambahan yang diperlukan untuk mendukung keberlanjutan kebijakan ini?</p> <p>1.Bagaimana distribusi manfaat ekonomi dari kebijakan ini bagi seluruh masyarakat Desa Dokan?</p> <p>2.Apakah seluruh kelompok masyarakat, termasuk perempuan dan pemuda, mendapatkan manfaat yang sama dari kebijakan ini?</p> <p>1.Bagaimana respons masyarakat terhadap kebijakan ini? Apakah ada keluhan atau masukan dari mereka?</p> <p>2.Bagaimana cara pemerintah desa menanggapi kebutuhan dan masukan masyarakat terkait pengembangan pariwisata?</p> <p>1. Apakah kebijakan ini sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Dokan?</p> <p>2.Bagaimana strategi desa dalam memastikan bahwa kebijakan ini tetap relevan dengan perkembangan zaman dan tren pariwisata?</p>
2.	Informan Kunci	Efektivitas	1.Apakah kebijakan ini membantu dalam melestarikan adat istiadat dan budaya lokal Desa

		<p>Efisiensi</p> <p>Kecukupan</p> <p>Pemerataan</p> <p>Responsivitas</p> <p>Ketepatan</p>	<p>Dokan?</p> <p>2. Bagaimana peran pemangku adat dalam mendukung implementasi kebijakan ini?</p> <p>1. Apakah ada keterlibatan pemangku adat dalam pengelolaan sumber daya untuk mendukung pariwisata berbasis kearifan lokal?</p> <p>2. Apakah waktu dan tenaga yang dicurahkan oleh pemangku adat dalam mendukung program wisata sudah sesuai dengan hasil yang didapatkan?</p> <p>1. Apakah ada keterlibatan pemangku adat dalam pengelolaan sumber daya untuk mendukung pariwisata berbasis kearifan lokal?</p> <p>2. Apakah waktu dan tenaga yang dicurahkan oleh pemangku adat dalam mendukung program wisata sudah sesuai dengan hasil yang didapatkan?</p> <p>1. Bagaimana keterlibatan berbagai kelompok adat dalam implementasi kebijakan ini?</p> <p>2. Apakah ada kelompok tertentu yang merasa kurang mendapatkan manfaat dari kebijakan ini?</p> <p>1. Bagaimana kebijakan ini merespons tantangan yang dihadapi dalam pelestarian budaya di tengah arus modernisasi?</p> <p>2. Apakah ada ruang dialog antara pemerintah desa dan pemangku adat dalam merumuskan kebijakan ini?</p> <p>1. Apakah kebijakan ini sesuai dengan nilai-nilai adat dan filosofi budaya masyarakat Karo?</p> <p>2. Apakah ada kekhawatiran bahwa kebijakan ini bisa mengubah atau menghilangkan unsur budaya lokal?</p>
3.	Informan Tambahan	<p>Efektivitas</p> <p>Efisiensi</p> <p>Kecukupan</p>	<p>1. Apakah kebijakan ini telah meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Dokan?</p> <p>2. Bagaimana pengalaman wisatawan dalam menikmati pariwisata berbasis kearifan lokal di desa ini?</p> <p>1. Apakah kebijakan ini telah meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Dokan?</p> <p>2. Bagaimana pengalaman wisatawan dalam menikmati pariwisata berbasis kearifan lokal di desa ini?</p> <p>1. Apakah masyarakat merasa sudah mendapatkan cukup dukungan dari pemerintah desa dalam mengembangkan pariwisata?</p>

			<p>2. Apakah wisatawan merasa bahwa pengalaman wisata mereka sudah cukup mencerminkan budaya lokal yang otentik?</p>
		Pemerataan	<p>1. Apakah semua lapisan masyarakat mendapatkan manfaat ekonomi dari kebijakan ini?</p> <p>2. Apakah ada kelompok masyarakat yang merasa kurang terlibat dalam pengelolaan desa wisata?</p>
		Responsivitas	<p>1. Bagaimana tanggapan wisatawan terhadap konsep wisata berbasis kearifan lokal di Desa Dokan?</p> <p>2. Apakah masyarakat memiliki kesempatan untuk memberikan masukan terkait pengelolaan desa wisata?</p>
		Ketepatan	<p>1. Apakah kebijakan ini benar-benar memberikan manfaat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat?</p> <p>2. Apakah wisatawan merasa bahwa desa ini telah menawarkan pengalaman wisata budaya yang autentik dan sesuai dengan ekspektasi mereka?</p>

LAMPIRAN



Gambar 8 Wisatawan Asing
Sumber: Dokumentasi Peneliti



Gambar 9 Tempat Wisata Desa Dokan Rumah Adat Si Waluh Jabu
Sumber: Dokumentasi Peneliti



Gambar 10 Warga Desa Dokan
Sumber: Dokumentasi Peneliti



Gambar 11 Dokumentasi di Tempat Wisata
Sumber: Dokumentasi Peneliti



Gambar 12 Kepala Desa Dokan
Sumber: Dokumentasi Peneliti



~ 5 ~

27. Wisata Tirta adalah upaya meningkatkan daya tarik wisata dari aspek yang berkaitan dengan olahraga air yang mampu menarik wisatawan.
28. Pemanfaatan adalah segala upaya untuk memanfaatkan serta memberdayakan lingkungan dan potensi yang ada untuk berbagai kepentingan yang diorientasikan untuk kesejahteraan masyarakat.
29. Pemangku kepentingan adalah para pihak yang terkait baik langsung maupun tidak langsung dalam pengembangan kepariwisataan di desa maupun yang terkena dampak dari aktivitas wisata pedesaan.

BAB II TUJUAN, FUNGSI, DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN DESA WISATA Pasal 2

Penyelenggaraan Desa Wisata bertujuan:

- a. memanfaatkan dan memberdayakan potensi lingkungan guna kepentingan wisata sejarah, wisata alam, wisata agro, wisata budaya, wisata buatan, wisata kuliner, wisata kerajinan tangan dan wisata taman bumi atau geopark dalam rangka peningkatan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan;
- b. memelihara dan membina secara terus menerus tata kehidupan, seni budaya masyarakat daerah;
- c. mengembangkan kualitas lingkungan masyarakat desa serta potensi kebudayaan dan wisata yang terdapat di masing-masing Desa Wisata;
- d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- e. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengembangkan potensi alam dan mengkonservasi/melestarikan adat, budaya serta arsitektur yang ada secara turun menurun;
- f. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam konservasi satwa dan tumbuhan khas serta lingkungan alam;
- g. mendorong masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih, rapi dan sehat;
- h. mempercepat penanaman sikap dan keterampilan yang sesuai dengan sapta pesona pariwisata Indonesia;
- i. menumbuhkan kebanggaan terhadap adat istiadat, budaya dan desanya; dan
- j. mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif.

Pasal 3

Desa Wisata berfungsi sebagai:

- a. sarana edukatif dan rekreasi;
- b. sarana pengembangan seni dan budaya;
- c. sarana pengembangan pariwisata berbasis masyarakat;
- d. sarana pengembangan perilaku dan budaya wisata; dan
- e. sarana pelestarian potensi dan sumber daya kepariwisataan.

Pasal 4

Desa Wisata diselenggarakan dengan prinsip:

- a. memanfaatkan sarana dan prasarana masyarakat setempat;
- b. menguntungkan masyarakat setempat;
- c. terjalinnya hubungan timbal balik wisatawan dengan masyarakat setempat;
- d. melibatkan masyarakat setempat; dan
- e. menerapkan pengembangan produk wisata desa.

BAB III...

SURAT PENGANTAR RISET DARI UNIVERSITAS MEDAN AREA



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 176/FIS.2/01.10/1/2025 Medan, 22/01/2025
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pengambilan Data/Riset

Kepada Yth.
Kepala Desa Dokan
Di Tempat

Dengan hormat,
Kami dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk dapat kiranya menerima mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Pedima Prima Ginting
NIM : 218520055
Program Studi : Administrasi Publik

Saat ini sedang membutuhkan beberapa data pada Kantor Kepala Desa Dokan Kecamatan Merek Kabupaten Karo untuk menyelesaikan penelitian/riset yang berjudul :

“ Evaluasi Peraturan Bupati Karo no 32 Tahun 2019 Tentang Desa Wisata Dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal Di Desa Dokan Kecamatan Merek Kabupaten Karo ”

Perlu kami jelaskan bahwa penelitian dan pengambilan data yang diperlukan ini semata-mata hanya untuk kepentingan penelitian dalam penyusunan skripsi. Sehubungan dengan ini, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan data yang diminta pada bidang yang bersangkutan.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Dekan
Dr. Walid Musthafa S, S.Sos, M.I.P

Tembusan:
1. Ka. Prodi Administrasi Publik
2. Mahasiswa ybs
3. Arsip

SURAT SELESAI RISET DARI DESA DOKAN

 PEMERINTAH KABUPATEN KARO
KANTOR DESA DOKAN
KECAMATAN MEREK
DI DESA DOKAN

SURAT KETERANGAN
Nomor : 470/126/DKN/2025

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini :
Nama : Martinus Sembiring
Jabatan : Kepala Desa Dokan

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa yang bersangkutan di bawah ini :
Nama : Pedima Prima Ginting
NPM : 218520055
Universitas : Universitas Medan Area
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan : Administrasi Publik
Judul skripsi : Evaluasi Peraturan Bupati Karo Nomor 32 Tahun 2019
Tentang Desa Wisata Dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal Di Desa Dokan Kecamatan Merek Kabupaten Karo.

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Dokan pada tanggal 03 Maret sampai 12 Maret 2025.

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan yang bersangkutan dan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Kepala Desa Dokan
Karo, 12 Maret 2025


Martinus Sembiring

